

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Derasnya arus globalisasi yang mengarah pada perdagangan bebas kini tengah melanda Negara-negara di dunia terutama di Indonesia yang sekarang ini sedang berupaya mempersiapkan diri. Akan ada banyak sekali kesepakatan-kesepakatan atau *agreement* yang akan dilaksanakan oleh komunitas Negara-negara dalam hal perdagangan bebas tadi, baik barang maupun jasa.

Adanya hal seperti ini, tentu menimbulkan peluang dan ancaman untuk memanfaatkannya atau menghadapinya. Diperlukan pendayagunaan kekuatan yang dimiliki dan upaya mengatasi kelemahan yang diikuti dengan upaya peningkatan efisiensi di segala bidang. Hal ini berlaku pula untuk profesi akuntan di Indonesia yang mau tidak mau harus meningkatkan kualitas profesionalismenya agar tidak kalah dengan para akuntan yang datang dari luar negeri untuk sama-sama bersaing di bursa akuntansi Indonesia.

Skandal akuntansi yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri akhir-akhir ini, sangat menyudutkan profesi akuntan di mata masyarakat. Menurut menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie mensinyalir adanya sejumlah akuntan besar yang melakukan manipulasi atau terlibat *mark up* data di BPPN (Satyo: April 2002). Saat ini yang paling penting dalam profesi akuntansi adalah pemilihan kepercayaan publik terhadap kredibilitas akuntan publik dan meningkatkan profesionalisme.

Setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) pada dasarnya mempunyai sistem pengendalian mutu yang sudah didesain oleh masing-masing Kantor Akuntan Publik tersebut. Untuk meningkatkan kredibilitas, salah satunya adalah dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan aturan etika secara efektif. Kantor Akuntan Publik juga harus memantau efektivitas sistem pengendalian mutunya dengan melakukan evaluasi secara rutin.

Sistem pengendalian mutu memberikan panduan bagi Kantor Akuntan Publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik, IAI. Dalam perikatan jasa profesional, Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mematuhi berbagai standar relevan yang telah diterbitkan oleh Dewan Kompartemen Akuntan Publik. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, Kantor Akuntan Publik wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesionalnya; bahwa Kantor Akuntan Publik dan para stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik dan bahwa staf Kantor Akuntan Publik kompeten, profesional, dan objektif serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Hal ini mengharuskan Kantor Akuntan Publik memiliki sistem pengendalian mutu (SPM) untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar dan aturan relevan yang berlaku. (SPAP; 2001: 001.09).

Saat ini, mekanisme penilaian mutu Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik telah disiapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Kantor Akuntan Publik (IAI-KAP) serta Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Kedua lembaga itu melakukan *review* sendiri secara independen dengan memakai standar yang sama yaitu program dan sistem pengendalian mutu. *Quality review* yang dilakukan oleh IAI-KAP diarahkan untuk memberikan konsultasi perbaikan dan peningkatan mutu kertas kerja akuntan publik dan sistem pengendalian mutunya, *compliance review* yang dilakukan Sub Direktorat pemeriksaan akuntan publik diarahkan untuk memeriksa kepatuhan yang bisa mengarahkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa mutu Kantor Akuntan Publik mulai diawasi secara ketat oleh organisasi profesi maupun pembina profesi akuntansi (Satyo: April 2002).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

**“Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik terhadap Kinerja Auditor”.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Penulis dalam hal ini merumuskan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian mutu yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik telah memadai
2. Apakah kinerja auditor Kantor Akuntan Publik telah efektif

3. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik terhadap kinerja auditor Kantor Akuntan Publik.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh data empirik dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pengaruh sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik terhadap kinerja auditor.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian mutu yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik
2. Untuk mengetahui kinerja auditor Kantor Akuntan Publik
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas penerapan sistem pengendalian mutu terhadap kinerja auditor Kantor Akuntan Publik.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai bahan masukan mengenai penetapan sistem pengendalian mutu dan kinerja auditor serta menjadi sumber pemikiran

## 2. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dan dapat pula dijadikan sumber referensi di masa yang akan datang khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi dan bagi IAI itu sendiri.

### 1.5 Rerangka Pemikiran

Di Indonesia, guna memberikan pedoman kepada auditor secara individual yang menjunjung tinggi kualitas audit dan memegang teguh kode etik akuntan publik dalam membantu Kantor Akuntan Publik dibutuhkan suatu standar yang mengatur tentang sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik. Unsur pengendalian mutu, sebagaimana terdapat dalam SPM Seksi 100 [PSPM No. 01] Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Independensi
2. Penugasan personel
3. Konsultasi
4. Supervisi
5. Pemekerjaan (*Hiring*)
6. Pengembangan profesional
7. Promosi (*advancement*)
8. Penerimaan dan keberlanjutan klien
9. Inspeksi

Selama ini untuk *mereview* praktik yang dilakukan oleh sebuah Kantor Akuntan Publik, digunakan *pe-review* yang menurut Arens, Elder, dan Beasley (2006:34) adalah suatu *review* yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap ketaatan suatu Kantor Akuntan Publik dengan sistem pengendalian (*quality control*). Arens, Elder, dan Beasley (2006:33) menyatakan bahwa *quality control* terdiri dari berbagai metode yang digunakan untuk memastikan bahwa Kantor Akuntan Publik telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya terhadap klien dan pihak lain, termasuk didalamnya struktur organisasi Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan serta berbagai kebijakan yang ditetapkannya.

Pengendalian kualitas (*quality control*) berkaitan erat tetapi berbeda dari SPAP. Suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memastikan bahwa SPAP telah dipatuhi dalam pelaksanaan setiap audit. Pengendalian kualitas merupakan prosedur yang digunakan oleh Kantor Akuntan Publik untuk memastikan bahwa ia mematuhi standar-standar tersebut secara konsisten pada setiap penugasan auditnya. Selanjutnya, pengendalian kualitas diterapkan pada seluruh bagian dari Kantor Akuntan Publik, di mana SPAP diterapkan pada masing-masing penugasan itu sendiri.

Di Indonesia, *pe-review* yang pernah berjalan selama ini ternyata belum mampu menstimulus perubahan ketaatan dalam diri anggota sehingga saat ini pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik akan dilaksanakan oleh badan tersendiri bentukan IAI-KAP. Badan *quality-review* ini mengkordinasikan *review* mutu Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Sementara pemeriksaan mutu Kantor Akuntan Publik yang diterapkan bukan *pe-review* dalam arti Kantor Akuntan

Publik memeriksa Kantor Akuntan Publik yang lain begitu juga sebaliknya. Karena tidak memakai format tersebut, maka IAI-KAP membentuk tim *review* yang diwadahi oleh badan *quality review*. Untuk melaksanakan program pemeriksaan mutu Kantor Akuntan Publik, badan *quality review* IAI-KAP bekerja sama dengan departemen keuangan, direktorat pembinaan akuntan, dan jasa penilai menyusun Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik.

*Quality review* yang dilakukan oleh IAI-KAP tidak diarahkan untuk memberikan sanksi tetapi memberikan konsultasi perbaikan dalam peningkatan mutu Kantor Akuntan Publik. Sementara *review* yang dilakukan Pembina akuntan lebih mengarah pada sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh Profesi Akuntan Publik.

Dalam PSPM No. 01 paragraf 07 mengenai unsur pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, salah satunya adalah unsur pemekerjaan yang menyebutkan bahwa pengerjaan yang memberikan keyakinan bahwa semua staf profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan peningkatan secara kompeten. Akhirnya, mutu pemekerjaan Kantor Akuntan Publik tergantung pada integritas kompetensi dan motivasi personal yang melaksanakan dan melakukan supervisi atas pemekerjaan. [Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Seksi 100: SPAP]

Dalam Pernyataan Sistem Pengendalian Mutu (PSPM) No. 02 tentang perumusan dan kebijakan prosedur pengendalian mutu mengenai promosi personel untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua personel yang memadai adalah semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki

kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik personel akan berimplikasi terhadap mutu pekerjaan Kantor Akuntan Publik, kualifikasi personel terseleksi untuk promosi harus tercakup namun tidak terbatas pula pada karakter, intelegensi, pertimbangan (*judgement*), dan motivasi. Sehingga dinyatakanlah identifikasi kriteria yang akan dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja personel dan keahlian yang diharapkan, seperti hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan teknis
2. Kemampuan analitis dan judgemental
3. Kemahiran komunikasi
4. Kemahiran memimpin dan melatih
5. Hubungan dengan klien
6. Sikap mental pribadi dan profesional
7. Kepemilikan Sertifikat Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk promosi ke posisi supervisor  
(PSPM No. 02: Perumusan dan Prosedur Pengendalian Mutu)

Kantor Akuntan Publik juga mempunyai aturan baku sebagai standar dalam melakukan praktiknya yaitu Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan serta tentang pedoman tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Segala hal mengenai praktik profesional Kantor Akuntan Publik diatur dalam SPAP, sehingga dalam review akan di lihat apakah Kantor Akuntan Publik tersebut sudah mendesain standar pengendalian mutu sesuai dengan SPAP atau tidak. Dengan

kata lain, standar pengendalian mutu yang baik adalah bila Kantor Akuntan Publik mendesain dan menerapkan sesuai SPAP.

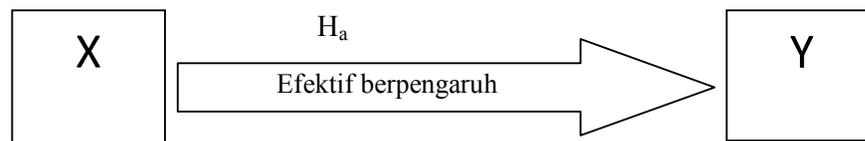
Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan untuk mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagi organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan (Mulyadi, 1993:419).

Hasil pekerjaan auditor dapat terlihat secara jelas melalui kertas kerja yang dibuatnya pada setiap penugasan (Mangoba dan Urutia, 1972: 1). Dengan kata lain, kertas kerja dapat digunakan untuk menilai kinerja auditor, sebab kertas kerja menggambarkan tingkat kompetensi seorang auditor melalui dokumentasi tentang prosedur-prosedur audit dan pengujian yang dilakukannya, sumber-sumber informasi yang telah diperoleh, serta kesimpulan.

Variabel kinerja auditor dalam penelitian ini dilakukan melalui kertas kerja dengan menggunakan kriteria kertas kerja yang baik. Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998,99) terdapat lima kriteria kertas kerja yang baik:

1. Lengkap: Setiap kertas kerja harus lengkap dan tidak boleh lagi memerlukan tambahan melalui penjelasan secara lisan.
2. Teliti: Kertas kerja harus berdasarkan kenyataan dan bebas dari kesalahan penulisan maupun perhitungan.
3. Jelas: Format dan isi kertas kerja sebaiknya mudah dibaca dan dimengerti.
4. Ringkas: Selain lengkap dan jelas, penyajian kertas kerja harus ringkas.

5. Rapi: Kertas kerja sebaiknya disiapkan dalam susunan yang rapi dan menggunakan daftar isi.



Sistem pengendalian

Kinerja auditor

mutu kantor akuntan publik

$H_0$  : Penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik yang efektif tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

$H_a$ : Penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik yang efektif berpengaruh terhadap kinerja auditor.

## 1.6 Metodologi Penelitian

Metode yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survey dengan dua macam kegiatan yang penulis lakukan. Cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

### 1. Penelitian lapangan (*Field Research*)

#### a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik ini

dilakukan terutama untuk jenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari peneliti.

b. Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis yang di jawab oleh responden. Pertanyaan dalam kuesioner ini mencakup pertanyaan tentang pendapat dan sikap responden tentang hal yang di teliti, dalam hal ini tentang efektivitas penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik dengan kinerja auditor.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan cara menggunakan data-data dari buku dan bahan-bahan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang di bahas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengkaji, serta menelaah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini diperlukan penulis sebagai:

- a. Bahan panduan untuk melakukan penelitian di lapangan
- b. Pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pembahasan masalah
- c. Dasar perbandingan praktik di lapangan

### **1.7 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada beberapa Kantor Akuntan Publik yang berlokasi di Bandung.